

PRESENTASI KETUA ACEH MONITORING MISSION

BAPAK PIETER FEITH

UNTUK PUSAT STUDI EROPA, UNIVERSITAS INDONESIA

SEMINAR "SETELAH TSUNAMI, DARI PEMULIHAN KE PERDAMAIAN"

JAKARTA, 3 MEI 2006

PENGALAMAN ACEH MONITORING MISSION

1. Menyusul sejumlah operasi di bekas negara Yugoslavia, Kaukasus dan Kongo, Uni Eropa telah memulai misi Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Eropa (European Security and Defense Policy – ESDP) yang pertama di Asia. Misi Pemantauan Aceh (Aceh Monitoring Mission) yang dipimpin Uni Eropa, dimana saya menjabat sebagai Ketua, telah memasuki tahap-tahap final dari mandatnya untuk memfasilitasi implementasi dari Nota Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
2. Bagan kerja perdamaian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 diciptakan untuk mengakhiri konfrontasi militer berdarah yang keji di provinsi Aceh, yang telah memakan korban lebih dari 12.000 jiwa dan mengakibatkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Dampak ekonomi dan politik dari konflik tersebut sangat dirasakan oleh Indonesia secara keseluruhan
3. Aceh adalah daerah yang mengalami konflik internal terpanjang di Asia dan beberapa usaha untuk berdamai juga telah dicoba oleh Pemerintah Indonesia dan GAM selama bertahun-tahun. Tahap terakhir dari perundingan damai dilakukan di Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan GAM dibawah pengawasan Crisis Management Initiative (CMI) pimpinan mantan Presiden Finlandia Marti Ahtisaari, segera setelah bencana Tsunami menghantam provinsi Aceh pada 26 Desember 2004. Perundingan yang mencapai 5 tahap dan dibiayai oleh Uni Eropa ini menghasilkan sebuah Nota Kesepakatan (MoU) yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Bagan kerja kesepakatan damai ini meliputi pemerintahan, partisipasi politik, ekonomi, peraturan hukum, hak asasi manusia, amnesti dan reintegrasi anggota GAM kedalam masyarakat, pengaturan keamanan, pemantauan dan penyelesaian pertikaian – kesemuanya ini adalah alasan AMM berada di Aceh.

Bagaimana Kami Bekerja

4. Misi Pemantau Aceh (AMM) dibentuk untuk memantau implementasi berbagai aspek dari kesepakatan damai yang tercantum dalam Nota Kesepakatan, berdasarkan atas undangan dari Pemerintah Indonesia dan dengan dukungan penuh dari kepemimpinan GAM. AMM melibatkan negara-negara anggota Uni Eropa serta 5 negara ASEAN: Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina.
5. Sebuah aspek penting dari awal sukses misi ini adalah pihak-pihak meminta negara-negara yang berkontribusi untuk berada di Aceh sejak hari penandatanganan Nota Kesepakatan. Ini adalah pembuktian yang sangat penting. Misi Pemantau Awal (Initial Monitoring Presence – IMP) diluncurkan pada 15 Agustus 2005 terdiri dari 80 personel yang tersebar di 5 lokasi di Aceh – IMP dibentuk dalam waktu 12 hari dan didirikan untuk menghindari potensi kekosongan yang mungkin muncul sebelum kami secara resmi membentuk AMM pada 15 Agustus 2005.
6. Kehadiran AMM memiliki mandat selama 6 bulan, dari 15 September 2005 – 15 Maret 2006, namun setelah itu diperpanjang hingga 3 bulan sampai 15 Juni atas permintaan dari kedua belah pihak. Saat ini kami melihat kepada perpanjangan untuk yang kedua kalinya hingga pelaksanaan Pilkada, kurang lebih hampir sama dengan perpanjangan yang pertama – tapi saya akan kembali ke topik ini nanti
7. AMM adalah misi sipil dan bukan misi militer, memiliki Markas Besar di Banda Aceh dan secara geografis terdiri dari 11 kantor wilayah tersebar di seluruh penjuru Aceh. Anggota pemantau melakukan tugas pemantauannya dengan berpatrioli dan berkomunikasi dengan kedua belah pihak, serta melaksanakan inspeksi dan penyelidikan jika diperlukan. Obyektivitas dari AMM adalah lebih kepada menjaga momentum proses perdamaian, berperan sebagai fasilitator dan membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.
8. Kami melakukan hal ini melalui pertemuan-pertemuan berkala dalam Pertemuan Komisi Pengaturan Keamanan (COSA) yang melibatkan perwakilan-perwakilan dari kedua belah pihak dipimpin oleh AMM, dan diadakan di tingkat pusat dan tingkat kabupaten. Dengan ini AMM mampu mengendalikan dan mengevaluasi kemajuan di berbagai langkah dalam pengimplementasian Nota Kesepakatan dan membantu memfasilitasi dan menyelesaikan setiap persoalan.

Proses

9. Lalu apa yang telah dicapai selama ini? Perlu diketahui, proses perdamaian Aceh saat ini berjalan sangat luar biasa baiknya dan mungkin diluar pengharapan banyak orang. Sesuai dengan Nota Kesepakatan, GAM telah menyerahkan 840 senjatanya kepada AMM dan pada 27 Desember 2005 GAM secara resmi telah membubarkan sayap militernya (TNA). Secara paralel, Pemerintah telah menarik sekitar 25.000 pasukan TNI non organik dan 5.700 pasukan Polisi non organik, seperti yang telah tercantum dalam kesepakatan Helsinki – hal ini juga

dikonfirmasi kembali melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh AMM pada awal tahun ini.

10. Fasilitas ekonomi yang tercantum dalam Nota Kesepakatan adalah untuk mantan pejuang GAM, tahanan politik yang mendapatkan amnesti dan korban sipil akibat konflik. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk paket fasilitas ekonomi bagi mantan pejuang GAM dimana GAM juga telah menggerakkan seluruh 3000 mantan pejuangnya. Sebuah badan yang mengkoordinir – BRA (Badan Reintegrasi Aceh) – dibawah administrasi pejabat berwenang Aceh – telah dibentuk untuk tujuan ini dan program tersebut sedang berjalan dengan baik dalam rangka pemenuhan komitmen. Pemerintah juga telah merencanakan pendidikan, pelatihan kejuruan dan alokasi lahan untuk mantan pejuang GAM. Langkah ini sangatlah penting untuk menghindari frustrasi dan keputus-asaan yang dapat menyulut kembali kekerasan dan aktivitas kriminal.
11. Sesuai dengan Nota Kesepakatan, semenjak penandatanganan MoU, total kurang dari 1800 tahanan GAM telah dibebaskan. Namun masih ada sekitar 65 kasus-kasus yang belum terpecahkan dimana AMM tengah berada dalam proses penyelesaiannya dengan bantuan dari seorang hakim internasional berpengalaman. Kami berharap dapat merampungkan kasus-kasus yang belum terselesaikan ini pada akhir Juni.
12. Dibawah pasal-pasal yang tercantum dalam Nota Kesepakatan, AMM bertugas memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini. Pemantauan terbatas pada pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan, yang terjadi setelah 15 Agustus 2005. Pemantauan lebih jauh difokuskan pada reintegrasi mantan anggota GAM dan suasana hak asasi manusia pada umumnya di Aceh. Pelaksanaan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan hak budaya adalah sesuatu yang harus mendapatkan perhatian khusus karena hak-hak tersebut berkaitan dengan usaha reintegrasi dan masa depan Aceh. Berdasarkan penilaian dari Bank Dunia jumlah insiden-insiden dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia telah menurun secara signifikan sejak misi AMM diluncurkan.
13. Seperti yang tercantum dalam Nota Kesepakatan, sebuah pengesahan Undang-Undang baru untuk Pemerintahan Aceh (RUU PA) akan diumumkan secara resmi. Hal ini juga akan diikuti dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secepatnya. Memang benar bahwa batas waktu yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Helsinki adalah 31 Maret – dan pengesahan RUU PA sudah melewati batas waktu tersebut – namun saya percaya bahwa akan lebih baik jika sebuah Undang-Undang dirumuskan secara teliti untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada mengesahkan UU dibawah desakan waktu. Sekarang hal ini adalah tanggungjawab DPR dan AMM tidak akan mencampuri kerja DPR dan tidak akan membuat pernyataan publik terhadap pasal-pasal yang sedang didiskusikan. Inilah yang disebut demokrasi. Sebuah aspek yang sering tidak terlihat adalah fakta bahwa proses perumusan RUU PA sangat inklusif dan transparan. Masyarakat Aceh telah memberikan masukannya, Pemerintah juga telah memberikan masukannya, dan sekarang DPR. Proses telah berjalan sangat demokratis.

Mengapa kali ini akan berhasil

14. Meskipun kegagalan perundingan COHA (Kesepakatan Penghentian Permusuhan) pada Desember 2002 masih segar di benak ingatan, suasana hati di kalangan masyarakat Aceh cukup baik dan ada rasa optimis yang berbeda kalau perdamaian kali ini telah menjadi kenyataan dan proses perdamaian menjadi suatu hal yang tidak dapat tergantikan lagi. Saya juga ingin menggarisbawahi bahwa ada beberapa perbedaan penting jika kita bandingkan antara COHA dengan AMM. Dengan tidak mengurangi segala rasa hormat terhadap LSM, AMM terdiri dari Uni Eropa dan ASEAN dan memiliki dukungan dari komunitas internasional yang lebih luas: ada beban yang lebih berat dibalik misi ini. Nota Kesepakatan adalah dokumen yang dibuat secara teliti dengan teks pendek yang relatif mudah termasuk ketepatan waktu yang jelas. Juga hasil kerja Presiden Ahtisaari yang tidak ternilai harganya. Secara paralel dampak kehancuran akibat terjangkit gelombang Tsunami juga pendekatan baru yang diambil Jakarta mengenai Aceh, kedua hal tersebut juga penting untuk mendorong perundingan dan kemudian pengimplementasiannya kedepan.
15. Seiring kita memasuki tahun kedua rekonstruksi pasca Tsunami, adalah sangat penting untuk diingat bahwa kaitan erat yang ada antara perdamaian dan pembangunan khususnya masalah Aceh membuahkan arti adanya ketergantungan antara rekonstruksi pasca Tsunami dan proses perdamaian. Telah sering dikatakan bahwa tanpa adanya penyelesaian damai akibat konflik, pembangunan kembali Aceh setelah Tsunami tidak akan memungkinkan – observasi ini juga ditegaskan kembali pada alinea pembuka di Nota Kesepakatan. Setelah AMM meninggalkan Aceh, proses reintegrasi dan rekonstruksi harus ditanamkan dalam program jangka lebih panjang yang memberikan keuntungan bagi seluruh warga Aceh yang terkena dampak akibat konflik.
16. AMM secara tegas berkomitmen terhadap proses perdamaian. Tujuan kami, bersama dengan Pemerintah, adalah hadir di Aceh hingga Pilkada. Hal ini juga dinyatakan oleh Javier Solana pada saat berkunjung ke Indonesia.

Cara baru untuk menjalankan misi-misi perdamaian

17. Sebagai misi Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Eropa yang pertama di Asia, AMM adalah sebuah ekspresi dari komitmen Uni Eropa yang bukan hanya terhadap proses perdamaian tetapi juga stabilitas dan perdamaian di kawasan secara keseluruhan. Kerjasama kami yang sangat baik sekali dengan para kolega dari ASEAN adalah sebuah langkah lebih jauh dari kemitraan yang dibangun oleh Uni Eropa dengan negara-negara ASEAN.
18. Pada setiap bagian dari misi, kami memiliki tim-tim pemantau gabungan antara Uni Eropa dan ASEAN. Partisipasi ASEAN menciptakan adanya sebuah misi legitimasi kawasan dan mereka juga memiliki pemahaman lebih baik akan budaya dan adat istiadat lokal. Dilain pihak, kami masyarakat Eropa juga memiliki pengalaman lebih luas dari misi-misi terdahulu dan hal ini secara menguntungkan meningkatkan kerjasama dimana hal tersebut telah terbukti.

19. Telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak ada misi yang pernah dibentuk lebih cepat dari misi ini. Selama perundingan di Helsinki, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepakat bahwa mereka ingin melihat sebuah kehadiran tim pemantau di Aceh dengan segera setelah penandatanganan Nota Kesepakatan. Adalah sangat penting pemantauan ditempatkan dengan segera. Kami mampu menempatkan para anggota pemantau kami yang pertama pada tanggal 15 Agustus. Ini bisa dijadikan standar bagi misi-misi Uni Eropa mendatang. Hal ini tentu saja akan menjadi salah satu pelajaran yang akan kami bawa bersama.
20. AMM merupakan landasan terobosan baru untuk misi-misi Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Eropa di masa mendatang dan kami katakan bahwa hal ini akan mengubah cara Uni Eropa melaksanakan operasi-operasi manajemen krisis. AMM memiliki campuran kompetensi yang unik antara pengalaman sipil dan militer. Masa depan dari krisis manajemen mungkin memerlukan instrumen dan ahli dengan cakupan latar belakang lebih luas, sesuatu yang semakin baik dan meningkat yang ditunjukkan oleh Uni Eropa dan dapat diberikan oleh Uni Eropa – sehingga menjalankan sebuah tindakan yang logis berdasarkan pilar institusi Uni Eropa.
21. Komisi Eropa mendukung proses perdamaian Aceh melalui bantuan reintegrasi mantan pejuang GAM, bantuan teknis dan pembangunan kapasitas di pemerintahan daerah serta pelatihan polisi. Dengan kata lain, ini adalah sebuah contoh yang baik tentang bagaimana kerjasama praktis antara berbagai institusi Uni Eropa khususnya Komisi Eropa dan Dewan Eropa, dapat meyakinkan bahwa proses perdamaian dapat menjadi suatu hal yang bisa berdiri sendiri.

Tantangan-tantangan ke depan – namun masih bersikap optimis

22. Masih ada beberapa tantangan penting ke depan. Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh (RUU PA) harus disahkan oleh Parlemen di Jakarta dan tanggal untuk Pilkada juga harus dipastikan. GAM harus mentransformasikan diri ke arah pergerakan politik. Ini merupakan titik kulminasi logis dalam proses rekonsiliasi. Seperti yang dinyatakan oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa Solana, bahwa suatu waktu antara setelah pengesahan RUU PA dan sebelum pelaksanaan Pilkada, GAM harus membubarkan diri dan mengganti nama serta misinya. Jika GAM mau, GAM bisa bertransisi ke sebuah pergerakan politik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia. GAM tentu saja akan tetap menjadi pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan sebagai salah satu penandatanganan Nota Kesepakatan Helsinki. Reintegrasi mantan pejuang GAM harus dilanjutkan. Kasus-kasus amnesti yang tertunda juga harus diselesaikan.
23. Yang sangat terpenting, tentu saja, adalah proses perdamaian berada pada jalur yang benar. Kembalinya sejumlah pemimpin tinggi GAM ke Aceh adalah sebuah pencapaian penting lainnya dalam jalan menuju kerukunan. Secara simbolik kepulangan mereka menunjukkan sebuah tanda bahwa ada kepercayaan yang meningkat antara kedua belah pihak dan hal ini juga memberikan harapan lebih bagi masyarakat Aceh dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

24. Dalam pertemuan formal COSA, seseorang juga dapat dengan mudah melihat komitmen yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak. Hal ini secara khusus dapat dilihat pada pertemuan dua minggu lalu antara Perwakilan Tinggi Uni Eropa Solana dengan Menteri Informasi dan Komunikasi Sofyan Djalil serta Bapak Malik Mahmud. Semangat positif ini secara mendalam amat sangat berarti bagi para anggota AMM dan kami merasa bahwa kami telah membuat suatu perbedaan dan berkontribusi terhadap sesuatu yang amat sangat berarti.
25. Ada banyak yang dipertaruhkan untuk masyarakat Aceh dan mengingat tragedi Tsunami, kami di AMM, bersama dengan Pemerintah Indonesia dan rekan-rekan dari GAM, melakukan yang terbaik untuk menunjukkan bahwa setelah dua bencana – yaitu konflik dan Tsunami – kami berada pada jalan yang tidak tergantikan lagi untuk sebuah perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.